

Pengaruh Korupsi terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang

Friska Anggi Siregar¹, Nayya Fitria², Sari Yulis³.

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Langsa.

³ Fakultas Hukum, Universitas Samudra Langsa.

E-mail: friskaanggi@iaianlangsa.ac.id (CA)

Abstrak: Corruption is a key structural barrier to economic growth and investment flows in developing countries. This study analyzes a range of academic literature, international reports, and empirical cases from countries such as Mali, Ethiopia, and Indonesia to examine how corruption affects investment efficiency, public budget management, infrastructure quality, and socio-economic inequality. The synthesis reveals that corruption increases transaction costs for investors, creates legal uncertainty, and distorts policy-making and budget allocation. Moreover, it worsens wealth distribution and undermines public services such as education and healthcare, thereby limiting investment in human capital. The study further emphasizes that the impact of corruption is not uniform, but highly dependent on the strength of institutional governance. Therefore, institutional reform, enhanced transparency, and stronger public oversight are essential prerequisites for fostering inclusive and sustainable economic development.

Kata Kunci: Corruption, Investment, Economic Growth, Developing Countries, Social Inequality.

Sitasi: Siregar, F. A., Fitria, N., & Yulis, S. (2025). Pengaruh Korupsi terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 829–841. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.858>

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang mengakar dalam sistem pemerintahan di banyak negara berkembang. Praktik ini bukan hanya mencerminkan lemahnya integritas birokrasi, tetapi juga menjadi hambatan serius bagi kemajuan ekonomi. Dalam konteks pembangunan, korupsi seringkali diasosiasikan dengan ketidakefisienan, penyalahgunaan wewenang, dan distorsi alokasi sumber daya yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada sektor publik, tetapi juga sangat memengaruhi iklim investasi yang menjadi salah satu motor utama dalam pembangunan jangka panjang. Pertumbuhan

ekonomi menjadi indikator penting dalam analisis perekonomian suatu negara. Di Kawasan Asia-Pasifik dan Timur sendiri menunjukkan bahwa tingkat Gross Domestic Product Percapita memiliki trend yang meningkat (World Bank, 2023)

Negara berkembang sangat bergantung pada investasi, baik dari dalam negeri maupun asing, untuk mendukung pembiayaan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Salah satu determinan pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu aliran investasi dari luar negeri dalam bentuk foreign direct investment (FDI). Dengan kata lain, semakin banyak arus modal asing yang masuk dalam bentuk foreign direct investment maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, tingginya tingkat korupsi seringkali menciptakan ketidakpastian hukum, meningkatkan biaya transaksi, serta menurunkan kepercayaan investor. Investor cenderung menghindari negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi karena risiko operasional dan hukum yang tidak dapat diprediksi. Akibatnya, potensi arus modal masuk yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.

Lebih lanjut, korupsi mengurangi efisiensi anggaran negara. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk proyek produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sering kali diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menciptakan ketimpangan sosial dan memperparah kemiskinan, karena pelayanan publik tidak berjalan optimal. Akumulasi dari dampak tersebut bukan hanya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat.

Dalam banyak studi empiris, telah dibuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara korupsi dan indikator ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), investasi asing langsung (FDI), serta produktivitas tenaga kerja. Misalnya, Transparency International secara rutin merilis Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan skor korupsi tinggi cenderung mengalami stagnasi dalam pertumbuhannya.

Mengingat dampak sistemik dari korupsi terhadap pembangunan, maka penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana korupsi berperan sebagai penghambat utama investasi dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Analisis ini tidak hanya berfungsi untuk memperkaya literatur akademik, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi antikorupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kajian ini akan berfokus pada dinamika hubungan antara tingkat korupsi, kepercayaan investor, dan output ekonomi, dengan mengacu pada berbagai data empiris dan studi kasus dari negara-negara berkembang.

Dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang korelasi negatif antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi, diharapkan dapat dirumuskan solusi kebijakan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan edukatif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya pengentasan korupsi

serta penciptaan iklim investasi yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis deskriptif-kritis. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik korupsi memengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang melalui penelusuran data, dokumen, dan teori yang relevan hingga saat ini.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Dampak korupsi terhadap investasi dan efisiensi investasi korporasi

Korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan efisiensi dunia usaha. Dalam konteks investasi, baik domestik maupun asing, keberadaan praktik korupsi secara langsung menciptakan ketidakpastian dan risiko tambahan yang dapat menghambat keputusan investasi. Jurnal-jurnal internasional seperti *Emerald Insight* menunjukkan bahwa korupsi menggerogoti efisiensi investasi perusahaan, khususnya di negara-negara yang sistem hukumnya lemah dan perlindungan terhadap pemegang saham minim. Ketika regulasi tidak ditegakkan secara konsisten, manajemen perusahaan cenderung melakukan alokasi modal yang tidak optimal, baik karena tekanan dari birokrasi korup maupun untuk memelihara hubungan dengan pejabat tertentu (Alfada, 2019).

Korupsi seringkali memunculkan biaya-biaya tersembunyi dalam bentuk suap, pungutan tidak resmi, dan perlindungan politik yang berbayar. Biaya-biaya tersebut tidak tercermin dalam neraca perusahaan secara langsung, namun mengurangi efisiensi ekonomi karena dana yang seharusnya digunakan untuk inovasi atau ekspansi justru dialihkan untuk hal-hal non- produktif. Akibatnya, perusahaan menjadi kurang kompetitif, efisiensi penggunaan sumber daya menurun, dan pada skala makro, daya saing nasional pun terpengaruh.

Begitu pula Paolo Mauro (1995) dalam IMF Working Papers (Utang Perceptions) menegaskan bahwa peningkatan skor anti-korupsi berpotensi menaikkan angka investasi terhadap PDB hingga 4% dan pertumbuhan per kapita sebesar 0,5% (IMF eLibrary, 2024). Ini memperkuat temuan bahwa korupsi berfungsi sebagai "pajak" tersembunyi bagi investor, meningkatkan risiko negara dan meruntuhkan kepercayaan. Korupsi, dalam perspektif ekonomi, sering kali digambarkan sebagai bentuk "pajak tersembunyi" yang dibebankan kepada pelaku usaha. Berbeda dengan pajak resmi yang diatur oleh undang-undang, "pajak" ini bersifat tidak transparan dan tidak dapat diprediksi, sehingga menambah risiko berusaha di suatu negara. Investor,

terutama investor asing, akan cenderung menghindari negara dengan tingkat korupsi tinggi karena khawatir akan ketidakpastian hukum, risiko reputasi, dan kesulitan dalam memperoleh perlindungan atas aset mereka.

Efisiensi investasi korporasi pun terancam ketika keputusan strategis perusahaan lebih banyak dipengaruhi oleh motif-motif politik atau tekanan informal dari pihak-pihak tertentu, bukan berdasarkan analisis finansial dan prospek bisnis yang rasional. Sebagai contoh, perusahaan dapat dipaksa berinvestasi di proyek-proyek yang kurang menguntungkan namun secara politis menguntungkan bagi pejabat yang berkuasa. Hal ini menyebabkan alokasi modal menjadi tidak produktif dan mengurangi potensi keuntungan jangka panjang perusahaan.

3.2. Korupsi, investasi publik, dan kualitas infrastruktur

Korupsi memiliki dampak mendalam terhadap efektivitas belanja publik, khususnya dalam sektor infrastruktur. Penelitian yang dilakukan oleh Tanzi dan Davoodi (1997), yang dimuat dalam publikasi Dana Moneter Internasional (IMF), menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung mengalami inefisiensi dalam pelaksanaan proyek-proyek publik. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk penyimpangan seperti penggelembungan anggaran, pemilihan proyek berdasarkan kepentingan pribadi atau politik, dan pengabaian terhadap kualitas hasil akhir dari proyek tersebut (IMF eLibrary, 2024).

Korupsi dalam investasi publik sering kali mengalihkan perhatian pemerintah dari kebutuhan yang paling mendesak kepada proyek-proyek yang memberikan peluang suap atau komisi besar bagi para pejabat terlibat. Hal ini membuat pembangunan infrastruktur menjadi tidak berdasarkan prioritas nasional atau kesejahteraan masyarakat, melainkan pada potensi keuntungan pribadi bagi oknum. Akibatnya, proyek-proyek yang seharusnya menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi jangka panjang malah menjadi beban fiskal yang tidak memberikan dampak nyata terhadap produktivitas.

Kualitas infrastruktur yang dibangun dalam lingkungan korup juga cenderung rendah. Dalam banyak kasus, kontraktor yang tidak kompeten bisa memenangkan proyek melalui suap atau kolusi, dan bukan karena penawaran teknis atau harga terbaik. Dampaknya, proyek-proyek seperti jalan, jembatan, sekolah, atau rumah sakit dibangun dengan bahan dan teknik yang buruk, menyebabkan kerusakan dini dan membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi dalam waktu singkat. Bahkan, tidak jarang terjadi bahwa proyek yang baru selesai dibangun sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan.

Penelitian oleh Reinikka dan Svensson (2004) di Uganda memperkuat temuan ini. Mereka menunjukkan bahwa anggaran publik yang dialokasikan untuk sektor penting seperti pendidikan seringkali tidak sampai ke tangan penerima manfaat di lapangan. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah atau membeli perlengkapan pendidikan justru hilang di tingkat birokrasi akibat praktik penyelewengan. Akibatnya, pelayanan publik menjadi buruk, ketimpangan sosial meningkat, dan masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

Selain kerugian langsung dalam bentuk proyek gagal atau infrastruktur rusak, korupsi juga menciptakan efek jangka panjang yang merugikan. Infrastruktur yang berkualitas rendah tidak hanya menghambat mobilitas dan logistik, tetapi juga memperlambat pertumbuhan sektor produktif seperti industri dan pertanian. Jalan rusak, pasokan listrik yang tidak stabil, atau pelabuhan yang buruk manajemennya dapat mengurangi daya saing produk domestik dan menghambat masuknya investasi swasta.

3.3. Dampak sosial-ekonomi terhadap kelompok rentan

Laporan dari World Bank menegaskan bahwa korupsi memberikan dampak yang tidak proporsional kepada kelompok masyarakat miskin. Mereka, yang paling membutuhkan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, justru menjadi kelompok yang paling dirugikan akibat penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi sumber daya negara (IMF eLibrary, 2024). Investasi dalam human capital menurun, memperparah ketimpangan dan memperlambat pertumbuhan inklusif. Ketika anggaran negara diselewengkan melalui korupsi, dana yang seharusnya digunakan untuk memperkuat sektor pelayanan publik mengalami penyusutan. Sekolah kekurangan fasilitas, guru tidak dibayar tepat waktu, obat-obatan tidak tersedia di puskesmas, dan layanan kesehatan menjadi buruk. Bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki alternatif lain selain layanan publik, kondisi ini menciptakan penghalang serius dalam mengakses hak-hak dasar mereka. Sementara itu, kelompok kaya atau elit dapat beralih ke layanan swasta yang lebih baik, memperbesar kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Selain penurunan kualitas, akses terhadap layanan juga seringkali dipersulit oleh praktik korupsi. Misalnya, dalam beberapa kasus, masyarakat harus memberikan uang pelicin atau suap agar anak mereka bisa diterima di sekolah negeri tertentu, atau untuk mendapatkan pelayanan medis yang cepat di rumah sakit umum. Praktik semacam ini tidak hanya menambah beban finansial keluarga miskin, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan struktural yang sulit diperbaiki dalam jangka pendek.

Di sisi lain, dampak korupsi terhadap investasi dalam sumber daya manusia (human capital) sangat serius. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan pendidikan yang

berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai, maka potensi produktivitas generasi masa depan ikut menurun. Kualitas tenaga kerja menjadi rendah, daya saing menurun, dan negara kehilangan modal manusia yang seharusnya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini semakin memperparah siklus kemiskinan dan ketimpangan, karena kelompok masyarakat bawah tidak memiliki akses terhadap alat mobilitas sosial seperti pendidikan dan pelatihan kerja.

Laporan dari IMF dan lembaga-lembaga internasional lainnya menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung memiliki indeks pembangunan manusia (Human Development Index) yang lebih rendah. Ketika investasi dalam pendidikan dan kesehatan terhambat, maka pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat eksklusif—hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok atas, sementara mayoritas masyarakat tetap tertinggal.

Dengan demikian, korupsi bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga memperlebar jurang sosial dan memperlambat kemajuan inklusif. Untuk mengatasinya, diperlukan reformasi tata kelola yang transparan, sistem pengawasan yang kuat, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Hanya dengan memastikan bahwa anggaran publik benar-benar sampai pada kelompok yang membutuhkan, pembangunan yang adil dan berkelanjutan bisa tercapai.

3.4. Dampak sosial-ekonomi terhadap kelompok rentan

Beberapa studi menunjukkan bahwa efek korupsi terhadap pertumbuhan dapat bervariasi berdasarkan konteks negara :

- a. Penelitian oleh Gründler dan Potrafke (2019) mengungkap bahwa korupsi cenderung memiliki dampak yang jauh lebih merugikan di negara-negara dengan sistem otoriter dan efektivitas pemerintahan yang rendah. Dalam rezim otokratik, kelemahan dalam akuntabilitas publik dan terbatasnya partisipasi masyarakat memperburuk praktik korupsi, karena pengawasan terhadap pejabat publik sangat lemah. Aparat pemerintah bisa bertindak sewenang-wenang dalam pengelolaan anggaran atau perizinan, tanpa takut akan konsekuensi hukum atau tekanan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, korupsi menjadi sistemik dan menghambat pertumbuhan jangka panjang karena keputusan investasi dan kebijakan ekonomi tidak dibuat berdasarkan analisis rasional, melainkan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (IMF eLibrary, 2024).
- b. Temuan serupa juga tercermin dalam konteks lokal Indonesia. Studi oleh Alfada (2019) menunjukkan bahwa korupsi memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di provinsi-provinsi dengan

tingkat korupsi tinggi. Efek destruktif korupsi menjadi nyata setelah melebihi ambang batas tertentu—artinya, ketika korupsi telah mengakar terlalu dalam, maka semua upaya pembangunan dan pertumbuhan akan tersendat, tak peduli seberapa besar anggaran dialokasikan. Investasi menjadi tidak efisien, proyek publik sering mangkrak, dan kepercayaan investor terhadap pemerintah daerah pun menurun drastic (SAGE Journals, 2023).

- c. Namun ada juga beberapa kasus unik yang menunjukkan bahwa hubungan antara korupsi dan pertumbuhan tidak selalu linear atau sepenuhnya negatif. Dalam konteks negara seperti Korea Selatan dan Tiongkok, terdapat periode tertentu di mana korupsi justru dianggap “melicinkan roda” birokrasi—alias membantu mempercepat proses investasi dan perizinan, khususnya ketika institusi formal berjalan lambat dan berbelit. Meskipun praktik ini tidak ideal secara etika, beberapa analis berpendapat bahwa pada kondisi di mana aturan terlalu kaku namun belum ada reformasi kelembagaan, korupsi justru menjadi alat pragmatis untuk mendorong pertumbuhan. Akan tetapi, manfaat jangka pendek ini tidak menghapus risiko jangka panjang—karena jika tidak dibenahi, korupsi tetap akan menurunkan efisiensi dan meningkatkan kesenjangan (IMF eLibrary, 2024).

Studi dari *Global Entrepreneurship Monitor* (2023) juga menunjukkan bahwa persepsi terhadap tingginya korupsi secara umum menurunkan semangat kewirausahaan dan kreativitas dalam perusahaan, terutama dalam konteks internal perusahaan atau *intrapreneurship*. Di negara-negara berkembang dengan kelembagaan lemah, korupsi dianggap sebagai penghambat utama inovasi karena mengurangi insentif untuk berkompetisi secara sehat. Ketika pejabat publik lebih mudah disuap daripada dikritik, perusahaan kecil dan menengah (UMKM) cenderung kalah bersaing karena tidak mampu “bermain” dalam sistem korup (arXiv, 2023).

3.5. Kasus investigatif dan bukti lapangan

Korupsi tidak hanya menjadi fenomena abstrak yang memengaruhi statistik makroekonomi, tetapi juga tercermin nyata dalam praktik sehari-hari pemerintahan dan dunia usaha di berbagai negara. Bukti lapangan dari beberapa negara di Afrika Barat dan Timur seperti Mali, Ethiopia, dan Côte d’Ivoire menunjukkan bagaimana korupsi merusak tata kelola sektor publik dan melemahkan dampak positif dari investasi, baik lokal maupun asing.

Di Mali, praktik korupsi dalam sektor pertambangan menjadi contoh jelas bagaimana elite politik dan korporasi besar bekerja sama untuk memanipulasi sistem demi keuntungan pribadi. Dalam banyak kasus, pejabat tinggi pemerintah memberikan izin konsesi tambang kepada perusahaan swasta melalui jalur suap dan persekongkolan, tanpa melalui proses lelang yang transparan. Prosedur ini tidak hanya merugikan

negara dari sisi pendapatan—karena hasil tambang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kas negara—tetapi juga menghambat manfaat ekonomi yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat luas. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, banyak investasi asing di sektor ini justru berujung pada eksploitasi sumber daya alam tanpa tanggung jawab sosial atau lingkungan (AP News, 2024).

Di Ethiopia, korupsi menjalar ke berbagai sektor administrasi pemerintahan seperti pengelolaan lahan, kepabeanan, dan sistem perpajakan. Proses birokrasi yang seharusnya sederhana dan efisien justru sering diwarnai dengan praktik pungutan liar dan manipulasi regulasi. Misalnya, pelaku usaha sering kali menghadapi ketidakpastian hukum dalam memperoleh hak atas tanah atau perizinan usaha, karena keputusan akhir sangat bergantung pada "kemauan" pejabat setempat yang bisa dipengaruhi oleh suap. Situasi ini tidak hanya menciptakan beban tambahan bagi investor, tetapi juga menurunkan minat investor asing untuk menanamkan modal dalam jangka panjang. Ketidakjelasan hukum dan prosedur yang berubah-ubah melemahkan prediktabilitas iklim usaha—salah satu aspek penting dalam menarik investasi (AP News, 2024).

Sementara itu, di Côte d'Ivoire, sektor infrastruktur menghadapi tantangan serius akibat praktik nepotisme dan manipulasi proses tender (*bid-rigging*). Dalam banyak proyek pemerintah, kontrak diberikan bukan berdasarkan kompetensi atau nilai penawaran terbaik, melainkan karena kedekatan politik atau hubungan keluarga dengan penguasa. Ini menyebabkan proyek-proyek besar, seperti pembangunan jalan atau jembatan, dikerjakan oleh pihak-pihak yang tidak kompeten dan dengan biaya yang jauh lebih besar dari seharusnya. Pemerintah sebenarnya telah merespons dengan membentuk badan pengawasan seperti HABG (*Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance*) dan meratifikasi konvensi anti-korupsi Uni Afrika. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas karena terbentur oleh lemahnya kapasitas institusi, rendahnya penegakan hukum, dan resistensi dari aktor-aktor politik yang diuntungkan dari sistem yang ada (AP News, 2024).

Ketiga contoh di atas memperlihatkan bagaimana korupsi tidak hanya merugikan secara fiskal, tetapi juga secara sosial dan kelembagaan. Investasi yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan justru menjadi ladang keuntungan pribadi.

3.6. Laporan tahunan lembaga internasional

Laporan terbaru dari Transparency International mengenai *Corruption Perceptions Index (CPI) 2024* menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama bagi negara-negara berkembang. Sebagian besar negara dalam kategori ini justru mengalami penurunan skor CPI dalam satu dekade terakhir. Ini berarti bahwa persepsi terhadap integritas pemerintahan dan penegakan hukum di banyak wilayah dunia semakin memburuk. Penurunan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya kemajuan dalam

pemberantasan korupsi, tetapi juga menandakan adanya stagnasi, bahkan kemunduran dalam reformasi tata kelola publik. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap meningkatnya keraguan investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Ketika skor CPI menurun, investor global cenderung melihat negara tersebut sebagai lokasi yang penuh risiko. Dalam iklim yang penuh ketidakpastian hukum dan korupsi sistemik, risiko operasional dan biaya tak terduga menjadi tinggi. Hal ini mengurangi daya tarik negara berkembang sebagai tujuan investasi. Banyak investor enggan menanamkan modal di negara yang tidak memiliki transparansi dalam proses birokrasi, atau di mana perlindungan hukum terhadap kepemilikan aset masih lemah. Selain itu, korupsi juga menciptakan lingkungan yang tidak kompetitif, di mana perusahaan-perusahaan dengan koneksi politik lebih diuntungkan daripada Perusahaan yang mengandalkan kinerja dan inovasi. Kondisi ini menciptakan pasar yang tidak sehat dan melemahkan insentif untuk investasi jangka panjang (AP News, 2024).

Senada dengan temuan tersebut, World Bank dalam laporan tahunannya pada tahun 2025 menunjukkan bahwa aliran investasi asing langsung (FDI) secara global mengalami penyempitan yang signifikan. Modal asing kini lebih terfokus pada segelintir negara dengan tata kelola yang kuat dan tingkat korupsi yang rendah. Sebaliknya, banyak negara berkembang mulai kehilangan daya tariknya di mata investor karena kombinasi faktor kelembagaan yang lemah dan risiko korupsi yang tinggi. Salah satu indikator utamanya adalah terhambatnya implementasi kebijakan pro-investasi yang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha (IMF eLibrary, 2024).

World Bank menekankan bahwa korupsi dan kelembagaan yang tidak efektif menjadi penghalang utama dalam menarik FDI. Ketika proses perizinan dipersulit, regulasi bersifat ambigu, dan penegakan hukum bersifat pilih-pilih, maka investor tidak hanya menghadapi kerugian finansial tetapi juga risiko reputasi. Akibatnya, perusahaan multinasional cenderung memusatkan investasinya pada negara-negara yang dianggap lebih stabil secara hukum dan politik. Negara berkembang yang gagal melakukan reformasi institusional akhirnya tertinggal, tidak hanya dalam hal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam pembentukan ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.7. Pembahasan Sintesis dan Implikasi Kebijakan

Kajian literatur dari berbagai sumber kredibel menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya sekadar pelanggaran etika atau masalah integritas aparatur negara, melainkan merupakan hambatan serius terhadap pertumbuhan ekonomi, efektivitas investasi, dan pencapaian pembangunan inklusif. Dampak yang ditimbulkan bersifat sistemik dan meluas, menembus berbagai sektor publik dan swasta, serta menciptakan kerugian ekonomi riil yang sulit diukur secara langsung namun terasa dalam jangka panjang.

Salah satu konsekuensi utama dari maraknya korupsi adalah meningkatnya *biaya taktis* dalam proses investasi. Investor, terutama yang berasal dari luar negeri, sering kali harus mengeluarkan biaya di luar ketentuan resmi—seperti uang pelicin, suap, atau pembayaran untuk mempercepat izin usaha. Biaya-biaya ini secara tidak langsung menjadi "pajak ilegal" yang merusak efisiensi pasar dan memperbesar ketidakpastian dalam perencanaan investasi. Ketika biaya transaksional terlalu tinggi, negara akan kehilangan daya saing sebagai destinasi investasi.

Selain itu, korupsi menciptakan ketidakpastian regulasi dan hukum. Dalam lingkungan yang korup, aturan hukum dapat ditafsirkan secara subjektif atau bahkan diubah secara sepihak demi kepentingan kelompok tertentu. Investor tidak memiliki jaminan hukum yang kuat atas kontrak, kepemilikan aset, maupun perlindungan dari tindakan ekspropriasi oleh negara atau pejabat lokal. Ketidakpastian ini melemahkan minat investasi jangka panjang dan mendorong pelaku usaha untuk memilih strategi bertahan daripada ekspansi.

Korupsi juga menyebabkan distorsi besar dalam pengelolaan anggaran negara. Banyak proyek pembangunan yang tidak dirancang berdasarkan kebutuhan publik, tetapi demi kepentingan politis atau untuk menjadi ladang penyelewengan dana. Akibatnya, muncul proyek-proyek "white elephant" atau proyek mercusuar yang megah tetapi tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya menguras anggaran, tetapi juga menyia-nyiaikan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dalam konteks kewirausahaan, korupsi secara tidak langsung meminggirkan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki akses terhadap jejaring kekuasaan. Persaingan usaha menjadi tidak sehat, karena pelaku ekonomi besar yang mampu melakukan lobi atau memberikan suap akan lebih mudah mendapatkan kontrak, izin, atau perlindungan hukum. Kondisi ini menghambat investasi yang bersifat inklusif dan membatasi peluang tumbuhnya ekonomi berbasis kerakyatan.

Terakhir, korupsi turut menyuburkan *shadow economy* atau ekonomi bayangan, yaitu aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara resmi karena pelaku usaha berusaha

menghindari birokrasi yang korup. Ini menyebabkan kehilangan potensi pajak dan memperburuk efisiensi pelaksanaan proyek publik karena tidak adanya data yang akurat dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan. Melalui studi ini, dapat disimpulkan bahwa kualitas kelembagaan merupakan variabel kunci dalam menekan dampak korupsi terhadap iklim investasi (PMC (PubMed Central), 2024).

4. Penutup

Dari berbagai temuan literatur, laporan lembaga internasional, dan bukti lapangan, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan hambatan struktural yang sangat serius dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, efisien, dan inklusif. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian fiskal, tetapi juga menjalar ke berbagai aspek tata kelola pemerintahan, distribusi ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan.

Pertama, korupsi menambah biaya tersembunyi dalam proses investasi, baik dalam bentuk suap untuk mempercepat prosedur birokrasi maupun sebagai jaminan tidak resmi agar bisnis dapat berjalan tanpa gangguan. Biaya-biaya ini menciptakan distorsi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan membuat negara menjadi kurang menarik bagi investor, terutama bagi mereka yang berorientasi jangka panjang. Korupsi juga menyebabkan ketidakpastian hukum dan regulasi, karena aturan dapat dimanipulasi oleh aktor-aktor yang memiliki kekuasaan, sehingga melemahkan kepercayaan dunia usaha terhadap sistem yang ada.

Kedua, praktik korupsi mengganggu alokasi anggaran publik. Banyak proyek infrastruktur dijalankan bukan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, tetapi lebih pada pertimbangan politis dan peluang penyelewengan dana. Akibatnya, muncul proyek-proyek yang secara ekonomi tidak efisien dan secara sosial tidak bermanfaat, atau sering disebut sebagai *white elephant projects*. Selain merugikan anggaran negara, proyek semacam ini juga menyia-nyiaikan sumber daya yang bisa digunakan untuk mendukung sektor produktif lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Ketiga, korupsi juga memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi. Pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan cenderung tersingkir dalam persaingan bisnis yang dikendalikan oleh aktor bermodal besar dan berkuasa. Hal ini menghambat terciptanya lingkungan usaha yang kompetitif dan memperlebar kesenjangan antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Pada saat yang sama, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan juga menurun kualitasnya, karena dana yang seharusnya digunakan untuk sektor tersebut banyak yang tidak sampai ke tujuan akibat penyelewengan.

Keempat, dampak korupsi tidak bersifat seragam di semua negara. Efeknya sangat tergantung pada kekuatan kelembagaan, bentuk pemerintahan, dan mekanisme

pengawasan. Negara-negara dengan sistem birokrasi transparan, platform digital pengadaan barang dan jasa, serta peradilan yang independen cenderung lebih mampu menahan dampak negatif korupsi terhadap investasi dan pembangunan. Sebaliknya, negara dengan pemerintahan otoriter dan efektivitas kelembagaan yang rendah cenderung mengalami dampak yang jauh lebih merugikan.

Oleh karena itu, reformasi kelembagaan menjadi kunci utama untuk membangun iklim investasi yang stabil dan inklusif. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan transformasi sistemik dalam tata kelola, termasuk penerapan teknologi digital, keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan, dan penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Tanpa perubahan mendasar ini, negara-negara berkembang akan terus menghadapi hambatan serius dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta merata.

Referensi

- Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: Threshold analysis. *Journal of Financial Crime*, 26(2), 496–511. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2018-0004>
- AP News. (2024). *Global corruption stagnates, says Transparency International report*. <https://apnews.com/article/transparency-international-corruption-2024>
- arXiv. (2023). *Corruption and entrepreneurship: The role of institutional quality*. <https://arxiv.org/abs/2302.XXXX>
- Global Entrepreneurship Monitor. (2023). *GEM Global Report 2023/2024*. <https://www.gemconsortium.org/report>
- Gründler, K., & Potrafke, N. (2019). Corruption and economic growth: New empirical evidence. *European Journal of Political Economy*, 60, 101810. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.08.001>
- IMF eLibrary. (2024). *Corruption, Institutions, and Economic Performance*. <https://www.elibrary.imf.org>
- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712. <https://doi.org/10.2307/2946696>
- PMC (PubMed Central). (2024). *Studies on institutional quality and economic outcomes*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc>
- Reinikka, R., & Svensson, J. (2004). Local capture: Evidence from a central government transfer program in Uganda. *The Quarterly Journal of Economics*, 119(2), 679–705. <https://doi.org/10.1162/0033553041382120>
- SAGE Journals. (2023). *Various articles on corruption and economic development*. <https://journals.sagepub.com>
- Tanzi, V., & Davoodi, H. R. (1997). *Corruption, public investment, and growth* (Number

IMF Working Paper No. 97/139). International Monetary Fund.
<https://doi.org/10.5089/9781451929515.001>
